

**AGAMA DAN KRISIS EKOLOGI:  
KETIDAKMAMPUAN PARA TOKOH DAN KIAI  
MELAWAN DOSA SEMEN DI REMBANG JAWA TENGAH<sup>1</sup>**

**Roy Murtadho**

Front Nahdliyyin Untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam

(FNKSDA)

roy.murtadho@gmail.com

**Abstract**

*The crimes against to the environment and the people of Indonesia, it is showed again in front of our eyes. The ruling of the Administrative Court judge of the Tribunal of State (PTUN) Semarang who rejected the lawsuit's overall Environment Forum (Walhi) and citizens of Rembang Central Java Governor against related permits the establishment of cement factories in Rembang on 16 April 2015, arguing the suit has expired, is not only a fallacy, more than that is their plotting evil politicians, legal and corporate to definitively destroy the island of Java. More so, the trial does not heed the fact that various Central Java Governor DECREE No. 660.1/17/2012 about the mining activities of the environmental permit for the cement factory in Indonesia Rembang, contrary to a number of laws. Mining in the North represent Kendeng Ciujung Group Portrait of a land conflict and deprivation of people's living space by large-scale extractive industries in Java. There are currently 77 mining permit material. The citizens of Java is mostly crowded and get the crisis of water, it should be avoided by mentaling. The agraria needs water which is not only dialy needs but also for the land of agraria. However, some of farmers is on the agrarian sector, which is done traditionally and subsistenly. If the mental industry is going to do more, the crisis of water and agrarian sector will be worse in Java.*

**Keyword :** Ecology Crisis, Religion, Mental, Semen Indonesia

**Abstrak**

*Kejahatan terhadap lingkungan dan rakyat Indonesia, sekali lagi dipampangkan di depan mata kita. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang yang menolak secara keseluruhan gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan warga Rembang terhadap Gubernur Jawa Tengah terkait izin pendirian pabrik semen di Rembang pada 16 April 2015, dengan alasan gugatan tersebut telah kadaluarsa, tak hanya sebuah kekeliruan, lebih dari itu merupakan persengkongkolan jahat politisi, hukum dan korporasi untuk secara pasti menghancurkan pulau Jawa. Lebih-lebih, persidangan tak mengindahkan berbagai fakta bahwa SK Gubernur Jawa Tengah No 660.1/ 17/2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bagi pabrik Semen*

---

<sup>1</sup> Jurnal ini adalah gabungan dua tulisan penulis yang pernah diterbitkan di Indoprogres.com. Kemudian diperdalam kembali untuk kajian yang lebih urgen bagi masyarakat akademis. Sumber utama tulisan bisa lihat <http://indoprogres.com/2016/08/krisis-ekologi-dan-bangkrutnya-peran-agama/> dan <http://islambergerak.com/2015/04/melawan-dosa-semen-indonesia-di-rembang/> di akses 30 Agustus 2016

*Indonesia di Rembang, bertentangan dengan sejumlah undang-undang. Penambangan di Pengunungan Kendeng Utara mewakili potret konflik lahan dan perampasan ruang hidup rakyat oleh industri ekstraktif skala besar di pulau Jawa. Saat ini ada 77 ijin pertambangan bahan semen (gamping dan kapur) yang sebagian telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pulau Jawa yang penduduknya padat dan mengalami krisis air, harusnya bebas dari kegiatan pertambangan. Air sangat dibutuhkan tak hanya untuk kebutuhan sehari-hari tapi juga sumber air bagi lahan-lahan pertanian. Apalagi sebagian besar petani menggantungkan hidupnya disektor pertanian, yang dikelola secara tradisional dan subsisten. Jika pertambangan ini diteruskan kondisi krisis air dan lahan pangan di Jawa akan makin memburuk.*

**Kata kunci:** Krisis Ekologi, Agama, Tambang, Semen Indonesia.

### **Pendahuluan**

“Manusia bisa hidup tanpa emas, tapi tak bisa hidup tanpa air”, demikian bunyi protes aktivis lingkungan di Banyuwangi atas eksploitasi hutan Gunung Tumpang Pitu oleh PT. BSI milik pengusaha Sandiaga Uno.<sup>2</sup> Gunung yang diturunkan statusnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi oleh bupati Banyuwangi Azwar Anas pada tahun 2013 tersebut, kini terancam kerusakan total bahkan musnah oleh aktivitas pertambangan emas di sana. Apa yang terjadi pada Gunung Tumpang Pitu merupakan salah satu gambaran kecil saja dari besarnya perusakan lingkungan di Indonesia oleh korporasi, baik di sektor perkebunan maupun tambang. Sehingga mudah ditebak, wilayah dimana ada sumber daya mineral bisa dipastikan sudah diduduki korporasi. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) oleh perusahaan-perusahaan tambang tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, tapi juga sangat merugikan negara dan sebagian besar rakyat yang hanya mendapatkan dampak kerusakan yang ditimbulkannya. Di Samarinda, Kalimantan Timur, contohnya, tambang batubara tidak hanya merusak lingkungan tapi juga membunuh puluhan anak-anak kecil yang tenggelam di bekas galian tambang yang dibiarkan menganga.

Jika ditinjau dari sejarah tahapan kapitalisme, meluasnya perusakan lingkungan dan meningkatnya konsentrasi kepemilikan penguasaan sumber daya pada korporasi-korporasi besar, merupakan bagian dari proses globalisasi dengan liberalisasi ekonomi sebagai ciri utamanya. Mengenai hal ini, apa yang dikatakan Marx dan Engels dalam *Manifesto Komunis*, pada akhirnya terbukti benar bahwa “kebutuhan akan pasar yang senantiasa meluas untuk barang-barang hasilnya menghalau borjuasi ke seluruh muka bumi. Ia harus bersarang di mana-mana, berusaha di mana-mana, mengadakan hubungan di mana-mana”.

Kedaulatan negara, sebagaimana seringkali dibicarakan, dihadapan institusi ekonomi global seperti WTO, World bank dan IMF menjadi semu dan

---

<sup>2</sup> <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/182883/aktivis-lingkungan-buat-petisi-tutup-tambang-emas-tumpang-pitu> Diakses 24 Agustus 2016

tak berarti apa-apa. Karena ketiga lembaga dunia tersebut, di balik jargon kebebasan yang dipromosikannya, sebenarnya hendak mengatakan bebas untuk menjarah di seluruh belahan dunia. Mengenai hal ini, Marx dan Engels dalam *Manifesto Komunis*<sup>3</sup>, lagi-lagi mengatakan, "...di dalam hubungan-hubungan borjuis sekarang ini yang dimaksud dengan kemerdekaan ialah perdagangan bebas, pembelian dan penjualan bebas." Dengan ini, demokrasi yang mula-mula dipahami sebagai, "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" kini telah bergeser menjadi, "dari korporasi, oleh korporasi, untuk korporasi." Tepat di sinilah, peran seorang pemimpin negara Dunia Ketiga seperti Indonesia, sebenarnya tak lebih hanya sebagai 'salesman' yang menjajakan potensi SDA yang melimpah sebagai bahan mentah industri dan tenaga kerja murah pada korporasi. Noorena Hertz dalam bukunya, *The Silence Take-over: Global Capitalism and The Death of Democracy*,<sup>4</sup> menunjukkan bahwa saat ini semua pelayanan publik yang seharusnya menjadi tugas negara telah terkooptasi oleh korporasi. Jadi, bisa dikatakan, pada hakikatnya negara telah sirna ditelan korporasi.

Ironis sekali, negeri yang seringkali dengan bangga disebut sebagai "Tanah Air" ini, ternyata sekitar 175 juta hektar teritorialnya (tanah dan laut) dalam bentuk HPH hutan, HGU perkebunan, dan KK pertambangan dan migas. Kalau ditotal, sekitar 175 juta hektar atau sekitar 93 persen luas daratan Indonesia telah dikuasai oleh korporasi. Sebanyak 85 persen kekayaan migas, 75 persen kekayaan batubara, dan 50 persen lebih kekayaan perkebunan dan hutan tak ada satu jengkal pun yang dikuasai republik ini. Sementara air tawarnya dikuasai sekitar 246 perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK), yang 65 persen dipasok oleh perusahaan semacam Aqua Danone dan Ades Coca Cola. Dengan kondisi ini tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang, Indonesia akan mengalami krisis air. Bukan tidak mungkin, kelak air akan jauh lebih berharga ketimbang emas. Sejak dibukanya kontrak karya pada tahun 1967, negeri ini telah menjadi surga bagi korporasi tambang dengan makin lebarnya jalan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan pintu terbukanya. Seolah-olah mereka disambut dengan spanduk besar, "Welcome to heaven...."

Berdasar laporan yang pernah dilansir Salamudin Daeng dari Institute for Global Justice (IGJ),<sup>5</sup> di masa Raffles (1811) pemilik modal swasta hanya boleh menguasai lahan maksimal 45 tahun; di masa Hindia Belanda (1870) hanya boleh menguasai lahan maksimal selama 75 tahun; dan anehnya di masa Susilo Bambang Yudhoyono (UU 25/2007), pemilik modal justru diperbolehkan menguasai lahan selama 95 tahun. Sementara perusakan dan perampokan hutan di Indonesia diperkirakan telah mencapai 2 juta hingga 2,4 juta hektar pertahun,

---

<sup>3</sup> Karl Marx & Frederick Engels, *Manifesto of the Communist Party*, dalam Karl Marx and Frederick, *Engels Selected Works*, Moscow: Progress Publishers, [1848]/1968.

<sup>4</sup> Noorena Hertz, *The Silence Take-over: Global Capitalism and The Death of Democracy*, London: William Heinemann, 2001.

<sup>5</sup> <http://igj.or.id/category/fokus-pemantauan/bilateral-investment-treaties-bit/> di akses 20 Agustus 2016

yang artinya pada tiap 1 menit hutan Indonesia hilang seluas 6x lapangan sepak bola dan dalam 1 tahun seluas 3x wilayah DKI Jakarta. Dan dalam 50 tahun terakhir, Indonesia telah kehilangan sekitar 64 juta hektar hutan atau 40 persen dari luas hutan sebelumnya. Artinya 3,8 juta hektar hutan rusak dalam setiap tahun, yang mengakibatkan turut musnahnya habitat alaminya.

### Peran Agama Melawan Kapitalisme

Terhadap situasi seperti ini, sebagai kaum beragama, kita perlu bertanya: dimana sebenarnya peran agama dalam perjuangan penyelamatan ruang hidup oleh ancaman *greedy* kapitalisme global? Kita yakin bahwa semua agama pada dirinya merupakan jalan pembebasan, karena faktanya secara historis tak ada satupun agama yang lahir dari dalam istana. Semua agama lahir di tengah-tengah rakyat dan menjadi suara kaum tertindas melawan tirani dan ketidakadilan.<sup>6</sup> Namun, kenapa sekarang, di hadapan perusakan besar-besaran alam, agama justru surut ke belakang? Kenapa agama hilang dari panggung sejarah perjuangan?

Sebelum menganalisis lebih lanjut aspek-aspek yang memungkinkan surutnya peran agama dalam berbagai perjuangan penyelamatan alam dari eksploitasi besar-besaran korporasi. Kiranya penting kita lihat terlebih dahulu sekilas, pandangan Islam terhadap alam dan peran manusia di bumi. Secara teologis, Islam menempatkan manusia sebagai *khalifah* (wakil) Allah di muka bumi yang sekaligus menerima amanat untuk menjaga dan mengelola bumi, sebagaimana dengan terang ditunjukkan dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah, 2:30, dan QS. al-Ahzab, 33:72. Sayangnya, manusia, khususnya umat Islam, seringkali berbuat sebaliknya. Allah sendiri mengatakan bahwa manusialah yang sesungguhnya membuat kerusakan di bumi, sebagaimana dalam QS. Ar-Ruum:41, "*Zhahara al-fasad fi al-barri wa al-bahr bima kasabat aidinnas...*" (Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia), yang oleh Ibnu Abbas dimaknai sebagai perbuatan merusak di lautan yang mengakibatkan rusaknya habitat ikan-ikan di laut.<sup>7</sup> Sementara dalam QS. Al-A'raaf:56, "*Wala tufsidu fi al-ard ba'da islahiha*" (Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya). Oleh Al-Qurthubi, ayat ini ditafsirkan sebagai larangan Allah pada umat manusia untuk berbuat kerusakan di atas bumi, baik sedikit maupun banyak.<sup>8</sup>

Maka semua kerusakan di bumi merupakan ulah manusia-manusia yang serakah dan tidak menyukuri nikmat Allah dengan merawat bumi sebaik-baiknya. Al-Qur'an menunjukkan beberapa penyebab kerusakan lingkungan (*fasad al-bi'ah*) diantaranya: Merusak (Al-A'raf, 7: 56 dan 74), (Al-Baqarah, 2: 60); Curang (Hud, 11: 85), (Al-Syura, 42: 181-183); Mengurangi/mengubah. (Al-Nisa',

<sup>6</sup> Roy Murtadho, *Haji Misbach Sebagai Mukadimah*, Makalah yang disampaikan dalam diskusi di MAP Fisipol UGM dengan tema "Agama dan Teologi Pembebasan" pada 7 Juni 2016.

<sup>7</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz IV, Cet. Bairut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M. hal. 40.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Juz VII, hal. 226.

4: 118-119); Dorongan hawa nafsu (Muhammad, 47: 22) (Al-An'am, 6:123) (Al-Isra', 17: 16); Tidak seimbang dan berlebihan (Al-Isra', 17: 25-26) (Al-An'am, 6:141) (al-A'raf, 7:31) (Al-Rahman, 55: 7-9) (al-Furqan, 25:67). Betapa tingginya penghormatan Islam terhadap kehidupan dan kelestarian sampai ada hadis yang berbunyi begini: 'Siapa yang membunuh seekor burung dengan sia-sia (tanpa maksud tertentu), burung tersebut akan mengadukan kepada Allah di hari kiamat, seraya berkata: "Wahai Tuhan, si fulan telah membunuhku dengan sia-sia dan aku dibunuh tidak dengan tujuan yang bermanfaat."<sup>9</sup> Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah bersabda: "Jika tiba hari kiamat dan seseorang dari engkau sedang membawa bibit kurma, hendaklah ia (segera) menanamnya."<sup>10</sup>

Mengenai tata kelola SDA, seorang ulama besar, al-alim allamah Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa sumber mineral haruslah dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat dan tidak boleh dimonopoli oleh orang perorang atau dikuasai pihak swasta.<sup>11</sup> Senada dengan apa yang dikatakan oleh Al-Zuhaili, di kalangan madzab Hambali dan Maliki memandang semua ciptaan Allah, berupa tambang, bebatuan, air, rerumputan (pada masa itu air dan padang rumput sangatlah vital untuk pakan ternak) haruslah dimiliki oleh negara.<sup>12</sup> Sedemikian, dalam Islam, jangankan merusak, memakai apa yang dari alam secara berlebihan saja dilarang. Bahkan para Ulama sepakat melarang menggunakan air secara berlebihan walaupun persediaan air dalam kondisi melimpah.<sup>13</sup> Sedemikian, dari sini kita bisa melihat bahwa dalam Islam, alat produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak haruslah dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan rakyat.

Dalam tradisi pesantren juga terdapat kaedah-keadah yang secara jelas menolak perusakan. Diantaranya:

1. Kaidah: لا ضرار ولا ضرار (Tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain)
2. Kaidah: الضرر يزال بقدر الإمكان (Kemudharatan harus dihilangkan semampunya)
3. Kaidah: الضرر لا يزال بضرر مثله (Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama)
4. Kaidah: يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى (Boleh melakukan mudharat yang lebih ringan untuk mengatasi mudharat yang lebih besar)
5. Kaedah: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (Melakukan mudharat yang khusus demi mencegah mudharat umum)

<sup>9</sup> 'Ali bin Balban al-Fâri, Ala`uddin. *Shahih Ibnu Hibban bit Tartib Ibn Balban*. No. 5894. Beirut: Lebanon. 1997. Juz 13 hal. 214,

<sup>10</sup> Hamdy bin Abdul Majid as-Salafy (ed), *Musnad Al-Samiyin*. Juz 1., (Beirut: Muassasah ar-Risalah, Cet. 1, 1405 H/1984 M), hal. 366.

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, 2004) Jilid V hal. 586

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 522.

<sup>13</sup> Lih. *Tuhfah al-Ahfazhi*, Jilid I, hal. 30.

6. Kaidah: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (Apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya)
7. Kaidah: درء المفساد مقدم على جلب المصالح (Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengharapkan kemaslahatan)

Bagaimana dengan sikap organisasi-organisasi Islam? Di atas kertas, sebenarnya tidak sedikit putusan hukum dari organisasi Islam yang mengecam perusakan lingkungan. Di NU misalnya. Dalam putusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-29 tanggal 4 1994/1 Rajab 1415 H di Cipasung, Tasikmalaya, menetapkan mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan *dlarar*, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*). Demikian juga dalam putusan Bathsul Masail NU pada muktamar 33 di Jombang, telah menetapkan bahwa neoliberalisme hukumnya haram. Namun, sayangnya, putusan-putusan hukum semacam itu belum terbukti efektif karena sifatnya sekadar himbauan moral dan tidak mengikat. Sehingga, perusakan tetap berlanjut dan bahkan tidak sedikit agamawan sendiri terlibat di dalamnya.

Sungguh negeri ini seperti telah dikutuk dengan berbagai kontradiksi, anomali dan ironi. Di tengah bisingnya suara promosi dan gegap gempitanya propaganda menjadikan Islam Nusantara sebagai model Islam dunia yang hendak menyelamatkan seluruh jagat raya, anehnya para kiai justru lupa untuk menyelamatkan perusakan Alam oleh korporasi perkebunan dan tambang yang tak hanya mengakibatkan krisis ekologi akut, tapi juga menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran kemanusiaan di mana-mana.

Mereka yang gemar mengatakan Islam “menyelamatkan”, justru tutup mata tutup telinga terhadap berbagai kerusakan lingkungan maupun sosial, seperti ketimpangan ekonomi yang ditimbulkan oleh persekongkolan jahat kapitalisme global dan pejabat publik. Malah, sepertinya, sekarang telah merebak agamawan munafik karena sikap pragmatis dan oportunistiknya dalam berpolitik. Diam-diam mereka menjadi bagian dari perusakan lingkungan ini untuk memperkaya diri sendiri. Padahal, sebagaimana kita tahu, eksploitasi SDA secara besar-besaran di tangan kuasa segelintir borjuasi berakibat fatal bagi keberlanjutan hidup bersama. Tidak hanya manusia tapi juga seluruh jagat raya. Maka dengan ini Allah menghimbau kita:

*“Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikan kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanamannya dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”* (QS. Al-Baqarah 204-205).

Sebagai kaum beragama, tentu kita patut marah dan kecewa dengan kondisi ini. Karena nyaris tak ada satupun statemen resmi dari kelompok agama untuk mengutuk bencana ekologis yang terjadi di hampir tiap jengkal wilayah negeri ini. Bahkan sulit kita temukan seorang agamawan yang berada di barisan

depan para pejuang lingkungan melawan berbagai penghancuran dan penguasaan atas SDA di tangan sedikit pemodal.

Dengan demikian, kita menjadi tahu bahwa kebisuan agamawan, khususnya kiai, terhadap berbagai kerusakan dan penghancuran yang terus berjalan, bukanlah dilatari oleh semangat teologis melainkan sikap politik pragmatis dan oportunistanya yang bersembunyi di balik prinsip “moderasi”. Tentu juga dibimbing oleh iman *enjoyment* dan kalkulasi untung rugi kapitalistik. Bahkan banyak yang sembrono menerima dana-dana yang tidak jelas sumbernya atau dana korporasi perusak lingkungan dan terang-terangan mengatakan dana-dana bantuan siluman tersebut sebagai rizki “*min khaitsu la yahtasib*”, yang berarti rizki yang tak disangka-sangka datangnya yang diberikan oleh Allah bagi orang yang bertakwa.

Selain sikap pragmatis dan oportunis dalam berpolitik, kepercayaannya pada teori *trickle down effect* yang berasumsi bahwa eksploitasi alam oleh korporasi di suatu wilayah akan memberi berkah kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya, juga turut mematikan spirit pembebasan Islam. Kondisi semacam inilah yang membikin pihak korporasi dan pejabat publik—yang hakikatnya pelayan korporasi—dengan mudah membungkam tokoh-tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama atau para kiai. Biasanya melalui dana-dana CSR (*corporate social responsibility*) yang dikucurkan oleh pihak korporasi ke berbagai tokoh, agar mereka berkenan mendukung eksploitasi alam dengan dalih pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sampai ada yang dengan *enteng* dan tanpa malu berseloroh: “Belum beroperasi saja korporasi sudah membawa berkah, bagaimana kalau sudah beroperasi?”.<sup>14</sup>

Entah sepakat atau tidak. Ketika Marx menganalisis kolonialisme Inggris di India dalam artikelnya ‘*Future Result of British and in Europe*’<sup>15</sup> yang pertama kali terbit di *New York Daily Tribune*, No. 3840, 8 Agustus 1853, sebenarnya telah mengingatkan kita bahwa semua pembangunan kapitalisme di Dunia Ketiga tak lain hanya untuk menumpuk kapital borjuasi, bukan untuk menyejahterakan rakyat.<sup>16</sup> Melalui industri modern berbasis kereta api yang dibangun Inggris di India, memang tak bisa dipungkiri telah menjadi pelopor industri modern di India. Dengan dibangunnya rel kereta api telah memicu cabang-cabang industri lainnya dan secara tidak langsung melenyapkan pembagian kerja yang bersifat turun temurun yang merupakan fondasi dari sistem kasta di India yang selama

---

<sup>14</sup> Ucapan berbagai tokoh yang mendukung eksploitasi perusahaan atas perusahaan yang memberi bantuan.

<sup>15</sup> Karl Marx, *The Future Results Of British Rule In India*, London, Friday, July 22, 1853. First published in the *New-York Daily Tribune* August 8, 1853 [reprinted Karl Marx and Friedrich Engels, *Collected Works* (New York International; Moscow: Progress, 1979), 12: 217-22

<sup>16</sup>Marx dengan jeli dan cerdas membongkar imperialisme Inggris di India yang sekilas tampak manusiawi, yang sebenarnya hanya untuk menumpuk kapital para petualang borjuasi Inggris. Lebih lanjut lihat. David Renton (ed), *Marx on Globalisation*, London: Lawrence & Wishart, 2001, hal. 90.

berabad-abad telah menjadi penghambat kemajuan dan memacetkan jalannya peradaban.

Namun, bagi Marx, pembangunan rel-rel kereta api oleh kaum *millocracy* Inggris di India bukanlah bertujuan untuk menyejahterakan rakyat India, melainkan semata-mata agar mereka bisa mengangkut kapas dan bahan-bahan mentah lainnya dengan biaya serendah mungkin demi kepentingan industri-industri manufaktur mereka. Demikian juga sebenarnya yang terjadi dengan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Semua eksploitasi alam di Indonesia terbukti tidak memberi manfaat pada rakyat Indonesia. Bahkan, gencarnya pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan di sepanjang pesisir selatan Jawa, bisa dibaca sebagai jalan untuk memuluskan jalannya eksploitasi ini.

Karena semua persoalan hidup telah diperhitungkan oleh kalkulasi untung rugi, saya khawatir, jangan-jangan kita (kaum beragama), yang konon katanya hamba Allah, sekarang telah bermetamorfosis menjadi hamba korporasi.

## **Pembahasan**

### **Mukadimah: Kondisi Umum Jawa**

Kejahatan terhadap lingkungan dan rakyat Indonesia, sekali lagi dipampangkan di depan mata kita. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang yang menolak secara keseluruhan gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan warga Rembang terhadap Gubernur Jawa Tengah terkait izin pendirian pabrik semen di Rembang pada 16 April 2015, dengan alasan gugatan tersebut telah kadaluarsa, tak hanya sebuah kekeliruan, lebih dari itu merupakan persengkongkolan jahat politisi, hukum dan korporasi untuk secara pasti menghancurkan pulau Jawa. Lebih-lebih, persidangan tak mengindahkan berbagai fakta bahwa SK Gubernur Jawa Tengah No 660.1/17/2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bagi pabrik Semen Indonesia di Rembang, bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

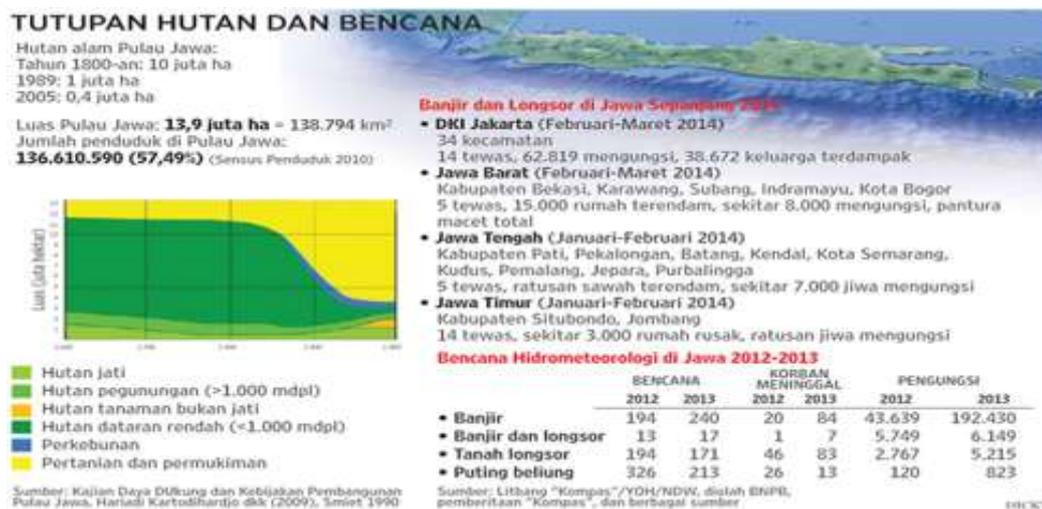
Untuk mengetahui betapa berbahayanya penambangan 'Karst' di Rembang oleh PT. SI perlu kiranya kita melihat kondisi Jawa secara umum, karena apa yang dilakukan di Rembang tak bisa dilihat sebagai kenyataan yang berdiri sendiri. Tapi terkait dengan daya dukung Jawa secara keseluruhan.

Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia. Jawa dengan luas sekitar 13 juta hektar menampung hampir 60 persen penduduk Indonesia pada 2010 dengan 1.057 jiwa per kilometer. Sementara luas Pulau Jawa hanya 6,77 persen dari total luas daratan Indonesia. Besarnya jumlah penduduk membuat daya dukung lingkungan Pulau Jawa sangat rendah. Hasilnya, berbagai bencana *antropogenik* menghantam Jawa silih berganti sepanjang tahun dan terus berulang. Alih-alih meningkatkan kembali daya dukung Jawa, pemerintah dengan berbagai kebijakan justru makin mengeksploitasi Jawa habis-habisan.

Guru Besar Manajemen Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodihardjo mengatakan, luas hutan alam di Jawa mulai berkurang sejak pertengahan tahun 1800-an.<sup>17</sup> Sebelum itu, hutan alam Jawa masih 10 juta hektar atau 77 persen dari luas Jawa. Selain penambahan penduduk, pada masa itu pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) dan membangun infrastruktur pendukung. Sejak masa inilah muncul perkebunan di Jawa.

Penurunan hutan terus terjadi. Pada 2005, luas hutan alam hanya tinggal 0,35 juta hektar alias 2,8 persen wilayah Jawa. Jika semua jenis hutan, seperti hutan rawa, hutan lahan kering, dan hutan tanaman, turut dikalkulasi, luas hutan di Jawa sebesar 18,7 persen luas Jawa.<sup>18</sup> Berdasarkan data Kompas 2014, sejumlah perusahaan semen dari dalam dan luar negeri telah siap masuk ke Jawa, di antaranya Siam Cement (Thailand) di Jawa Barat, Semen Merah Putih (Wilmar) di Banten, Ultratech di Wonogiri, dan Jui Shin Indonesia di Jawa Barat. Adapun Semen Puger akan beroperasi di Jember, dan Semen Panasia di Jawa Tengah. Belum lagi yang akan masuk di luar Jawa. Dengan melihat kondisi seperti itu, Pulau Jawa akan terbebani oleh industri ekstraktif yang akan terus merangsek masuk ke pulau Jawa karena berdasarkan peta MP3EI Koridor Jawa dijadikan sebagai pusat industri dan jasa.<sup>19</sup>

Gambar. 1



<sup>17</sup> <http://omahkendeng.org/2014-03/2043/eksploitasi-lahan-darurat-daya-dukung-jawa/> diakses 20 Agustus 2016

<sup>18</sup>Kompas, 5 Maret 2014. Atau bisa diakses di <http://omahkendeng.org/2014-03/2043/eksploitasi-lahan-darurat-daya-dukung-jawa/> dan <http://print.kompas.com/2014/03/05/Darurat-Daya-Dukung-Jawa>

<sup>19</sup><http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/03/krisis-lingkungan-tanah-jawa> diakses pada 23 Maret 2015.

Maka kita tak percaya kalau akademisi semacam Eko Haryono<sup>20</sup> dan pihak PT. SI tak tahu kondisi umum Jawa saat ini yang tengah terancam oleh berjubelnya industri di Jawa. Mereka tahu bahwa hutan Jawa telah kehilangan 61 % tutupan hutannya. Setiap tahun berkurang 138 ribu hektar. Lebih-lebih dibanding dengan pulau lain, Pulau Jawa memiliki laju deforestasi yang paling tinggi, disusul Bali Nusa Tenggara (46%) Maluku (25%) Sumatra (24%), dan Kalimantan (17%).

Tabel. 2

Provinsi	Tutupan Hutan Tahun 2000 (ha)	Tutupan Hutan Tahun 2009 (ha)	Deforestasi (ha)	Laju Deforestasi (ha)
Banten	128.337,80	91.478,63	36.859,18	3.685,92
Jawa Barat	953.984,29	357.240,88	596.743,40	59.674,34
Jawa Tengah	507.949,60	127.878,48	380.071,12	38.007,11
Jawa Timur	690.912,09	321.380,83	369.531,26	36.953,13
Total	2.281.183,78	897.978,82	1.383.204,96	138.320,50

Sumber: Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009, FWI (2011)

### SI Mengancam Kelestarian Lingkungan

Proses pembangunan pabrik Semen Indonesia (SI) Rembang yang tengah berlangsung dan terus mendapat penolakan, tidak hanya masyarakat Rembang, tapi juga berbagai elemen masyarakat, aktivis dan pemerhati lingkungan saat ini, terang menjadi ancaman bagi pulau Jawa. Pabrik yang mempunyai nilai investasi sebesar 3,7 triliun, dengan luas pabrik 103 hektar (ket. PT SI), atau 105 hektar (dok.Amdal), sudah sepantasnya menjadi musuh bersama segenap rakyat Indonesia khususnya Jawa.

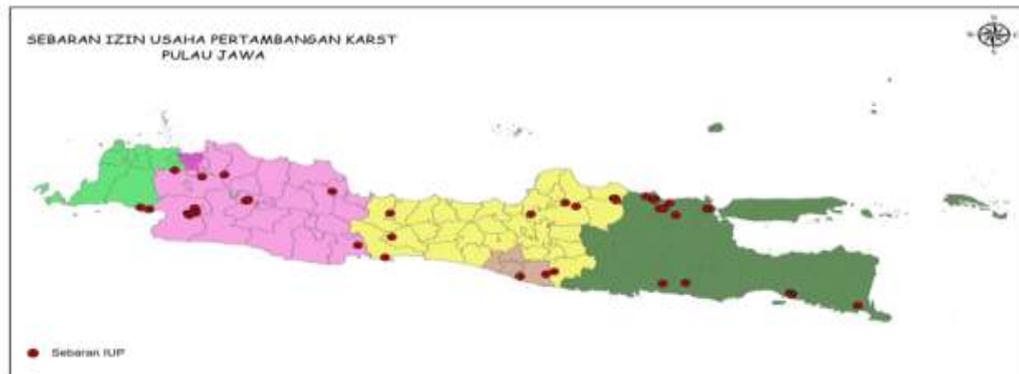
Pendirian Pabrik Semen tak hanya akan membidik Pegunungan Kendeng Utara, khususnya Rembang tapi seluruh Jawa.<sup>21</sup> Menurut data Jatim, pada tahun 2013 saja izin tambang Karst di Jawa mencapai 76 izin yang terdapat di 23 Kabupaten 42 Kecamatan dan 52 desa dengan total konsesi tambang karst

<sup>20</sup> <http://literasi.co/2015/04/ugm-beri-sanksi-eko-haryono-dan-heru-hendrayana/> Eko Haryono (dosen Geografi) dan Heru Hendrayana (dosen Geologi) yang menjadi saksi ahli bagi pihak PT. Semen Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Adapun tim yang mempelajari kesaksian dua akademisi UGM itu terdiri dari dosen-dosen dan para mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, diantaranya Geografi, Teknik Geologi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kehutanan, Hukum Lingkungan, dan Kedokteran. Menurut tim ini, UGM menyayangkan atas kesaksian kedua akademisinya pada sidang PTUN. Hal itu dikemukakan karena kedua akademisi UGM tersebut tidak pernah melakukan penelitian secara seksama terkait karst, air dan tanah di wilayah Rembang. Mereka dianggap hanya melihat kontur wilayah berdasar pada gambar-gambar yang tersedia tanpa meng-cross check langsung keadaan obyektif yang terjadi di wilayah Rembang.

<sup>21</sup> Penambangan Karst dan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara akan dilakukan di Rembang oleh PT Semen Indonesia (Semen Indonesia Rembang, Gunung Mas Mineral, dan Bosowa). Di Pati oleh PT. Sahabat mulia Sakti anak perusahaan Indosemen. Di Grobogan oleh Vanda Prima Lestari. Blora oleh Masco Tambang Raya.

34.944,90 hektar. Kondisi ini bisa menjadi ancaman serius bagi lingkungan di Pulau Jawa.<sup>22</sup>

Gambar. 3



Sumber: Jatam, Peta Izin Usaha Pertambangan Karst Pulau Jawa

Jika kita amati sejak awal apa yang dilakukan oleh pabrik Semen Indonesia dengan mengeksploitasi pegunungan Karst Kendeng Utara telah melanggar hukum dan moral sekaligus. Pembangunan pabrik semen tersebut secara nyata telah melakukan pelanggaran: pertama, pembangunan tersebut tidak sesuai dengan persetujuan tukar menukar kawasan hutan. Berdasar surat kementerian kehutanan No S.279/Menhut-II/2013 tertanggal April 2013.<sup>23</sup> Kedua, Cekungan Air tanah watu putih tidak boleh dijadikan area penambangan Karst. Berdasar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jateng No. 6/2010 Pasal 63 bahwa kawasan Semen Indonesia Rembang merupakan “area kawasan lindung imbuh air”.<sup>24</sup> Ketiga, berdasar Perda RTRW Rembang No 14/2011 “area adalah kawasan lindung geologi”.<sup>25</sup> Dan Perda RTRW Rembang No. 14/2011 mengatakan “kec Bulu tidak diperuntukkan sebagai kawasan industri besar”. Secara moral, PT Semen Indonesia tak mengindahkan kelestarian alam pegunungan Kendeng Utara dan keberlanjutan kebudayaan masyarakat agraris di Rembang dengan dalih demi percepatan pembangunan.

Kawasan yang akan menjadi ladang tambang dan berdirinya pabrik Semen merupakan kawasan Cekungan Air Tanah Watuputih. Berdasarkan hasil pendataan secara berkala yang dilakukan oleh Semarang Caver Association (SCA) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, menyatakan terdapat 44 Ponor, 74 goa yang tersebar di sekitar wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih dan 4 diantaranya merupakan goa yang memiliki sungai bawah tanah aktif. Terdapat 128 mata air yang

<sup>22</sup>Mengenai informasi pentingnya kawasan Karst bisa dibaca di <http://geo.fis.unesa.ac.id/web/index.php/en/geomorfologi-karst/133-peran-penting-kawasan-karst>

<sup>23</sup> Surat Kementerian Kehutanan No S.279/Menhut-II/2013 tertanggal April 2013.

<sup>24</sup> Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jateng No. 6/2010

<sup>25</sup> Perda RTRW Rembang No 14/2011

tersebar di wilayah CAT Watuputih sebagai mata air parenial yang mengalir di sepanjang musim kemarau dan penghujan.

Air yang dihasilkan dari sumber-mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih melebihi kebutuhan dasar masyarakat akan air yang rata-rata membutuhkan 15 - 20 liter/hari/orang. Jika nilai ini dievaluasi sebagai potensi ekonomi, maka jumlah air yang dihasilkan akan melebihi nilai yang didapat dari sektor pertambangan yang justru berpotensi mengurangi bahkan menghilangkan pasokan dan distribusi air pada sumber-mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih. Mata air Sumber Semen menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di 14 Kecamatan Kabupaten Rembang, dengan estimasi memenuhi kebutuhan 607.188 jiwa di 14 kecamatan Kabupaten Rembang (PDAM, 2013). Kebutuhan air tersebut sebagian besar disuplai dari CAT Watuputih dan sebagian lagi dari sayap antiklin yang membentang antara Gunung Butak - Tengger dan sekitarnya maupun dari selatan Desa Tahunan. Keberadaan sungai bawah tanah di kawasan Kendeng kini terancam rencana pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia. Lokasi tambang dan pabrik berada di wilayah cekungan air tanah Watuputih, yang memiliki fungsi penangkap air dan sebagai cadangan air bagi masyarakat Rembang dan Blora.<sup>26</sup>

### **Petaka Pembangunan**

Dunia kini tengah diuji kewarasannya. Neoliberalisme dipuja-puja dan dibela bak Tuhan baru yang dianggap sebagai penentu baik buruknya sejarah umat manusia. Sementara suara hati jernih petani yang menjadi korban pembangunan dan idustrialisasi dianggap sepi. Bahkan ironisnya, berjuta-juta kaum beriman kini tengah mengimani neoliberalisme jauh melampaui agamanya sendiri. Padahal, saat ini jika ada hantu yang tengah bergentayangan ke seluruh penjuru dunia tak lain adalah neoliberalisme. Namun bagi pendukung fanatisnya "Neoliberalisme dianggap koentji!". Siapa pendukung fanatisnya? Aparatus negeri ini yang menjadi babu dan anjing penjaga kepentingan ekonomi global di Indonesia. Mereka telah menggadaikan sumber daya manusia dan alam Indonesia demi lapangnya jalan akumulasi kapital

---

<sup>26</sup>Lih.<https://www.facebook.com/jmppk.rembang/posts/369867293197955> rilis "Aksi Menuntut Keadilan untuk Alam Kendeng" pada 16 April 2015 oleh JMPPK rembang menjelang putusan PTUN. Lebih lanjut kita bisa melihat catatan Ming Ming Lukiarti Koordinator JMPPK Rembang mengenai potensi Karst Pegunungan Kendeng Utara, "Menurut hasil penelitian oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber daya Mineral pada tahun 1998, perbukitan Gunung Watuputih merupakan bentang alam karst yang terbentuk pada zaman Pliosen dengan fenomena khas berupa lapies, gua kering dan berair, lembah kering, dan bentuk depresi yang teramati dari foto udara. Sebagian gua pada batu gamping karst merupakan gua kering yang berbentuk vertikal, serta masih bersifat alami dan tidak dimanfaatkan untuk keperluan tertentu. Secara hidrogeologis, pada tempat-tempat tertentu akan terbentuk saluran bawah permukaan yang mengalirkan air tanah ke daerah luah sehingga memungkinkan terdapatnya mata air dengan debit relatif besar". Lih.<https://www.jurnalperempuan.org/blog/ming-ming-lukiarti-perjuangan-ibu-ibu-petani-rembang-melawan-korporasi-tambang>

melalui, -meminjam terma David Harvey- *accumulation by dispossession* (akumulasi dengan cara perampasan/penjarahan)<sup>27</sup> yang dioperasikan sejak rezim orba. Itu terlihat dengan cara berpikir direktur PT. SI yang selalu berdalih bahwa eksplorasi dan eksploitasi pegunungan Kendeng Utara merupakan ikhtiar untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Rakyat mau tak mau, setuju tak setuju dipaksa harus setuju. Seolah-olah yang mengerti baik buruknya petani adalah korporasi.

Semua perusahaan nasional maupun trans-nasional tabiatnya sama: mencari keuntungan dirinya sendiri, apalagi untuk negeri kita. Adalah kekeliruan besar jika kita percaya kalau pembangunan di negeri ini untuk kesejahteraan rakyat. Sejak kontrak karya dibuka,<sup>28</sup> seluruh rakyat di negeri ini tetap terlunta-lunta, dan yang meraup keuntungan hanya kapitalis-birokrat, dan perusahaan-perusahaan transnasional.

Tiap tahun angka kemiskinan terus naik. Kesenjangan ekonomi dan sosial tak lagi bisa dijembatani. Angka kemiskinan tahun 2014 naik 28,28 juta dari sebelumnya 28,07 juta di tahun 2013. Pada tahun 2015 diperkirakan presentase penduduk miskin naik menjadi 30,25 juta jiwa. Dan yang lebih mengejutkan penduduk miskin di Indonesia jauh lebih banyak ketimbang seluruh penduduk Malaysia dan tujuh kali lipat penduduk Singapura.

Sebagai pelajaran bagi rakyat Indonesia tentang betapa kejinya praktek korporasi, selain Lapindo yang sudah kita ketahui bersama, baik kiranya kita mesti mengingat kembali kejahatan *Union Carbide* (UC), perusahaan yang mengelola pabrik pestisida di Bhopal India, yang berusaha menghindari tanggung jawabnya atas kematian ribuan orang dan ratusan korban-cidera akibat semburan gas dahsyat di tahun 1984 dari perusahaan yang berpusat di Amerika Serikat tersebut. Ketika UC sepakat pada tahun 1989 untuk membayar santunan \$ 470 juta, pemerintah India malah membatalkan semua tuduhan kriminal terhadap perusahaan tersebut. Meski tuntutan kriminal dibuka

---

<sup>27</sup>Terma *accumulation by dispossession* (akumulasi lewat penjarahan) dipakai oleh Harvey "dalam konteks pengertian kelanjutan dan perluasan praktek-praktek akumulasi yang Marx sebut sebagai tahap 'primitif' atau 'awal' pada masa lahirnya kapitalisme. Praktek-praktek ini meliputi komodifikasi dan privatisasi atas tanah, dan pengusiran secara paksa petani". Dalam bukunya *A Brief History of Neoliberalism*, ia memberi contoh kasus-kasus penjarahan yang terjadi di Meksiko dan Cina, dimana tujuh puluh petani diusir dari lahannya. Menurut Harvey, akumulasi lewat penjarahan ini memiliki empat fitur utama yaitu: privatisasi dan komodifikasi, finansialisasi, manajemen dan manipulasi krisis, dan redistribusi oleh negara. Lebih lanjut lih. David Harvey, *The New Imperialism*, Oxford: Oxford University Press, 2003. Dan David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford: Oxford University Press, 2005.

<sup>28</sup>Sejara setelah orde baru tegak, rezim militer Soeharto membuat seperangkat undang-undang mengenai penanaman modal pada 1967, yaitu UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing. UU itu untuk mengizinkan modal asing untuk bebas beroperasi di Indonesia. Seminggu setelah UU tersebut dinyatakan berlaku, Kontrak Karya (KK) antara pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia Incorporated ditandatangani, tepatnya tanggal 7 April 1967. Tentu saja penandatanganan KK tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin suku-suku pemilik hak ulayat di wilayah bersangkutan. Lih. Amirudin dan Aderito Jesus De Soares, *Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer*, Jakarta: Eslam, 2003, hlm. 39.

kembali tahun 1991 terhadap perusahaan dan sejumlah eksekutifnya, namun pada tahun 1994 UC menjual seluruh asetnya di India.<sup>29</sup>

Sedemikian, dengan melihat kondisi Jawa sebagaimana di muka, masihkah ada penjelasan yang lebih jernih mengenai perusakan alam yang tengah menjalar di sekujur tubuh negeri ini selain fakta kerusakan alam dan terdegradasinya kemanusiaan yang hanya menjadi komoditas bagi industri. Adakah argumentasi teoritis dan teologis sekaligus yang bisa membenarkan perilaku syaitaniyah korporasi-korporasi besar di Indonesia. Tokoh agama mana yang bisa mengumpulkan dalil-dalil agama untuk membenarkan kelakuan bejat korporasi-korporasi besar di negeri ini, wabil khusus PT. Freeport yang membodohi bangsa ini. Ilmuan manakah yang bisa menutupi kedurjanaan tokoh politik, tokoh agama, dan pengusaha yang di banyak tempat tengah selingkuh membangun oligarki politik dan ekonomi di negeri ini. Tak ada! Satupun tak ada. Karena pasti akan terbentur dengan realitas yang hadir telanjang di mata mereka.

Kita semua wajib marah mendengar segelintir tokoh yang mengatakan bahwa rakyat tak bisa menolak pendirian Pabrik Semen Indonesia karena pabrik tersebut merupakan BUMN, karena bagi mereka, menolak BUMN merupakan bentuk melawan negara. Cara berpikir semacam itu berbahaya karena pada dirinya telah melucuti kedaulatan rakyat sebagai pemilik sah negeri ini. Harusnya, mengenai baik dan buruknya nasib rakyat harus dikembalikan kepada rakyat itu sendiri, bukan ditangan politisi komprador yang selalu mengatasnamakan kedaulatan NKRI harga mati. Segelintir tokoh tersebut juga mengatakan kalau sampai pabrik itu gagal berdiri akan merugikan nilai investasi yang sangat besar.

Apalah artinya milyaran rupiah investasi dibanding kerusakan ekologis, historis dan sosiologis yang harus ditimpa penduduk Jawa dikemudian hari. Tak ada bandingnya sama sekali, tidak setitikpun! Juga, apalah artinya kerugian investasi kalau rakyat menjadi babu di negeri sendiri. Kita mempunyai pelajaran berharga, yang menikmati Freeport bukan rakyat Papua, tapi imperialis Amerika.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Sejak 1984, 20.000 orang kehilangan nyawa mereka di Bhopal, India setelah tumpahan gas kimia dari pabrik pestisida. Lebih dari 8.000 orang tewas hanya dalam beberapa hari pertama setelah kebocoran, terutama dari serangan jantung dan pernapasan. Mengenai tragedi Bhopal bisa diakses <http://www.greenpeace.org/usa/en/campaigns/toxics/justice-for-bhopal/mengenai> tragedi di Bhopal India. Dan untuk informasi lebih dalam bisa dilihat di [www.bhopal.net](http://www.bhopal.net) dan [www.bhopal.org](http://www.bhopal.org) Untuk melihat lebih lanjut perusahaan-perusahaan transnsional perusak lingkungan di dunia lih. Jed Greer dan Kenny Bruno, *Kamuflase Hijau Membedah Ideologi Lingkungan Perusahaan-Perusahaan Transnasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

<sup>30</sup>Mengenai kejahatan Freeport di tanah Papua. Berikut saya kutipkan sedikit narasi tentang kejahatan Freeport dari karya Amirudin dan Aderito de Jesus Soares, "Mining Jurnal pada 20 Oktober 1989, melaporkan, Freeport merupakan perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia dengan ongkos produksi yang rendah, yakni hanya 45 sen dollar per ounces. Keuntungan yang dibawa ke New Orleans mencapai milyaran dollar. Sementara untuk kesejahteraan penduduk, freeport tidak berbuat banyak. Freeport lebih memilih untuk memberikan uang jaminanterhadap pinjaman 673 juta dollar AS antara 1991 sampai 1997 kepada tiga pengusaha Indonesia yang sangat dekat dengan Soeharto ketimbang memperbaiki kehidupan suku Papua

## Penutup

Penambangan di Pengunungan Kendeng Utara mewakili potret konflik lahan dan perampasan ruang hidup rakyat oleh industri ekstraktif skala besar di pulau Jawa. Saat ini ada 77 ijin pertambangan bahan semen (gamping dan kapur) yang sebagian telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pulau Jawa yang penduduknya padat dan mengalami krisis air, harusnya bebas dari kegiatan pertambangan. Air sangat dibutuhkan tak hanya untuk kebutuhan sehari-hari tapi juga sumber air bagi lahan-lahan pertanian. Apalagi sebagian besar petani menggantungkan hidupnya disektor pertanian, yang dikelola secara tradisional dan subsisten. Jika pertambangan ini diteruskan kondisi krisis air dan lahan pangan di Jawa akan makin memburuk. Cekungan Air Tanah Watuputih telah dinyatakan sebagai area yang harus dilindungi oleh para pengambil kebijakan justru hendak dieksploitasi habis-habisan.<sup>31</sup> Kemudian apa yang masih tersisa dari kita sebagai warga negara yang secara yuridis dan politis mempunyai hak untuk menentukan nasib negeri ini? Hanya satu kata: kita lawan terus setiap ketidakadilan dan perusakan lingkungan.

## Daftar Pustaka

- Ali bin Balban al-Fâri, Ala`uddin. *Shahih Ibnu Hibban bit Tartib Ibn Balban*. Juz 13, no. 5894, Beirut: Lebanon. 1997.
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz IV, Cet. Bairut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M.
- Amirudin dan Aderito Jesus De Soares, *Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer*, Jakarta: Eslam, 2003.
- Amirudin dan Aderito Jesus De Soares, *Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer*, Jakarta: Eslam, 2003.
- David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford: Oxford University Press, 2005.
- David Harvey, *TheNew Imperialism*, Oxford: Oxford University Press, 2003.
- David Renton (ed), *Marx on Globalisation*, London: Lawrence & Wishart, 2001.
- Hamdy bin Abdul Majid as-Salafy (ed), *Musnad Al-Samiyin*. Juz 1,. Beirut: Muassasah ar-Risalah, Cet. 1, 1405 H/1984 M.

---

yang kehidupannya dari hari ke hari...pada awal 1995, jumlah produksi Freeport sebesar 100.000 ton konsentrat tembaga per hari. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 115 ton pada akhir 1995. Jumlah produksi tahun tersebut sebenarnya sudah meningkat lebih dari 30% dibandingkan dengan tahun 1994, yakni 75 ribu ton perhari. Ketika berproduksi pertama kali pada tahun 1973, produksi Freeport hanya sebesar 7.500 ton per hari. Pada 1998 dan 1999, Freeport berencana meningkatkan produksi per hari menjadi 330.000 ton konsentrat. Peningkatan produksi ini telah disetujui oleh pemerintah Indonesia...Dan berdasar penyelidikan Business New, 22 Januari 1997, Freeport kini menguasai areal konsesi penambangan setara dengan 40 kali luas Kota Jakarta” Lebih lanjut lih. Amirudin dan Aderito Jesus De Soares, *Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer*, Jakarta: Eslam, 2003, hal. 45

<sup>31</sup> Ini berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2030 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011 - 2031 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.

- <http://igj.or.id/category/fokus-pemantauan/bilateral-investment-treaties-bit/>  
di akses 20 Agustus 2016
- <http://literasi.co/2015/04/ugm-beri-sanksi-eko-haryono-dan-heru-hendrayana/>  
<http://geo.fis.unesa.ac.id/web/index.php/en/geomorfologi-karst/133-peran-penting-kawasan-karst>
- <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/03/krisis-lingkungan-tanah-jawa>  
diakses pada 23 Maret 2015.
- <http://omahkendeng.org/2014-03/2043/eksploitasi-lahan-darurat-daya-dukung-jawa/> diakses 20 Agustus 2016
- <http://print.kompas.com/2014/03/05/Darurat-Daya-Dukung-Jawa>
- <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/182883/aktivis-lingkungan-buat-petisi-tutup-tambang-emas-tumpang-pitu> Diakses 24 Agustus 2016
- <http://www.greenpeace.org/usa/en/campaigns/toxics/justice-for-bhopal/mengenai>
- <http://indoprogress.com/2016/08/krisis-ekologi-dan-bangkrutnya-peran-agama/>
- <http://islambergerak.com/2015/04/melawan-dosa-semen-indonesia-di-rembang/>
- <https://www.jurnalperempuan.org/blog/ming-ming-lukiarti-perjuangan-ibu-ibu-petani-rembang-melawan-korporasi-tambang>
- Jed Greer dan Kenny Bruno, *Kamuflase Hijau Membedah Ideologi Lingkungan Perusahaan-Perusahaan Transnasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Karl Marx & Frederick Engels, *Manifesto of the Communist Party*, dalam Karl Marx and Frederick, *Engels Selected Works*, Moscow: Progress Publishers, [1848]/1968.
- Karl Marx, *The Future Results Of British Rule In India*, London, Friday, July 22, 1853. First published in the New-York Daily Tribune August 8, 1853 [reprinted Karl Marx and Friedrich Engels, *Collected Works*, New York International; Moscow: Progress, 1979.
- Kompas, 5 Maret 2014. Atau bisa diakses di <http://omahkendeng.org/2014-03/2043/eksploitasi-lahan-darurat-daya-dukung-jawa/>
- Noorena Hertz, *The Silence Take-over: Global Capitalism and The Death of Democracy*, London: William Heinemann, 2001.
- Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jateng No. 6/2010
- Perda RTRW Rembang No 14/2011
- Roy Murtadho, *Haji Misbach Sebagai Mukadimah*, Makalah yang disampaikan dalam diskusi di MAP Fisipol UGM dengan tema "Agama dan Teologi Pembebasan" pada 7 Juni 2016.
- Surat Kementerian Kehutanan No S.279/Menhut-II/2013 tertanggal April 2013.
- Wahbah al-Zuhayli, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, Jilid V, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, 2004.